

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 189 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Disdukcapil yang selanjutnya disebut Renstra Disdukcapil adalah dokumen perencanaan Disdukcapil untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Disdukcapil yang selanjutnya disebut Renja Disdukcapil adalah dokumen perencanaan Disdukcapil untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Disdukcapil yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Disdukcapil, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Disdukcapil adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Disdukcapil untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Disdukcapil Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Disdukcapil untuk melaksanakan rencana kerja Disdukcapil;
(2) Renja Disdukcapil Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Disdukcapil tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Disdukcapil;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Disdukcapil dengan dokumen RKPD dan Renstra Disdukcapil;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Disdukcapil yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Disdukcapil digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja Disdukcapil selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA DISDUKCAPIL

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Disdukcapil Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Disdukcapil tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA DISDUKCAPIL

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Disdukcapil menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Disdukcapil meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Disdukcapil sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Disdukcapil dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Disdukcapil.

Pasal 7

(1) Disdukcapil membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Disdukcapil.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Disdukcapil disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Disdukcapil tahun berjalan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.

(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Disdukcapil melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disdukcapil dan evaluasi hasil Renja Disdukcapil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disdukcapil terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Disdukcapil.

(3) Kepala Disdukcapil menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Disdukcapil.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Disdukcapil dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DISDUKCAPIL

Pasal 9

(1) Renja Disdukcapil dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Disdukcapil beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Disdukcapil tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 189

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA.....TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS ..... KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

I. I. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja....Tahun 2026 Adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

o. Peraturan Bupati Bandung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas .... (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor ...)

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistimatika

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ..... TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas .... Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas .... Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas .... Kabupaten Bandung
II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ... Kabupaten
Bandung
II.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung
II.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS .... KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas .... Kabupaten Bandung
III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS .... KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas .....

BAB V
PENUTUP

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
V.3. Rencana Tindak Lanjut

Soreang, ...

2025

KEPALA DINAS .....

ttd.

XXXXXXXXX

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

***catatan:**
- font : Bookman Old Style ukuran 12
- tidak boleh di bold
- tidak boleh pake warna

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk masa depan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dan sumber daya yang tersedia. Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta proses evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana pembangunan daerah. Renja disusun sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Renja berlandaskan pada dokumen perencanaan lainnya, yakni Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja menjadi instrumen operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mencakup lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renja meliputi persiapan awal, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen final. Renja yang telah ditetapkan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah melalui proses penetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pembangunan daerah. Renja juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Dengan adanya Renja, Perangkat Daerah memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang akan digunakan untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2026. Dalam penyusunannya, telah melalui kajian terhadap berbagai aspek, seperti evaluasi kinerja tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021–2026, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
l. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
m. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
o. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
x. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
z. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;

hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

ii. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

jj. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

kk. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

mm. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

nn. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung;

oo. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung;

pp. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.

qq. Peraturan Bupati Bandung Nomor 304 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;

rr. Peraturan Bupati Bandung Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kabupaten Bandung;

ss. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

tt. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 109 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

uu. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
vv. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Merupakan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap pertama yakni Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
6. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

I.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

Pada bab ini memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Ranwal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Pada bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Pada bab ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sasaran RKPD, serta capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan catatan penting dalam penyusunan Renja, kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya, telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan di bidang Penataan Administrasi Kependudukan.

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Tahun 2026 merencanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan prakiraan realisasi capaian Target Renstra sampai dengan 2025, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan PD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2	12	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	01	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil	75.6	80.6	75.56	80.9	107.07	75.58	75.58	100
						Persentase BMD dalam Kondisi Baik	85.55%	97.98%	85.45%	98.69%	115.49%	85.50%	85.50%	100
2	12	01	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	4	4	4	100%	4	12	60
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45	9	6	6	100%	9	24	53
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	0	1	1	0
2	12	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1	1	0
2	12	01	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	5	5	5	100%	5	15	60
2	12	01	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	01	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48	60	48	48	100%	48	156	325
2	12	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	5	5	5	100%	5	15	60
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	6	60
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	2	2	2	100%	2	6	60
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630	126	126	126	100%	126	378	60
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	0	0	0	0	1	1	20
2	12	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	3	3	3	100%	3	9	60
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60
2	12	01	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang layak Pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100%	1	3	300
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	26	26	100%	29	84	290

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	44	0	0	0	0	44	44	100
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109	109	106	106	100%	109	324	297
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	300
2	12	02	0	0	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP-el	99,9%	96,36%	99,7%	99,59%	99,89%	99,7%	99,7%	99,80%
						Cakupan kepemilikan KK	98,5%	93,95%	97,5%	98,79%	101,33%	97,5%	97,5%	98,98%
						Cakupan kepemilikan KIA	80%	30,59%	60%	44,14%	73,56%	60%	60%	75,00%
						IKM	85,55	88,38	85,45	88,54	103,62%	85,45	85,45	99,88%
2	12	02	2.01	0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10	2	2	2	100%	2	6	60
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3,750,000	639.825	750000	716043	95%	750000	1466683	39
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,400	497	280	313	112%	280	1090	78
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	300,000	45.091	60000	60263	100%	60000	120308	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	02	2.03	0	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	100%	100%	100%	166.67%	167%	100%	367%	367
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15	3	3	6	200%	3	12	80
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1000	200	200	200	100%	200	600	60
2	12	03	0	0	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	99%	90,53%	97%	91,02%	93,83%	97%	97%	97,98%
						Cakupan kepemilikan akta kematian	90%	53,39%	70%	86,05%	122,92%	70%	70%	77,78%
						IKM	85,55	88,38	85,45	88,54	103,62%	85,4	85,4	99,82%
2	12	03	2.01	0	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	108.79%	109%	100%	309%	30.879
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	330,025	82.398	69400	81603	118%	75425	157110	48
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	4	4	4	100%	4	12	300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	03	2.02	0	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	155	31	31	31	100%	31	93	60
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	10	1	0	0	0	2	3	30
2	12	04	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
2	12	04	2.01	0	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	78.465	73.85%	63.08%	230%	365%	63.08	6612%	84%
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25	22	5	18	360%	5	45	180
2	12	04	2.02	0	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	15	3	3	3	100%	3	9	60
2	12	04	2.03	0	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	100%	100%	100%	135%	135%	100%	335%	3.35
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15	3	3	3	100%	3	9	60
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	25	5	5	12	240%	5	22	0.88
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	10	2	2	2	100%	2	6	60
2	12	04	2.04	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	1	1	1	100%	1	3	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	05	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan	62	62	62	62	100%	62	186	300%
2	12	05	2.01	0	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah data profil perkembangan kependudukan yang ditetapkan dalam dokumen profil kependudukan	5	1	1	1	100%	1	3	60
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5	1	1	1	100%	1	3	60

Sumber: Disdukcapil, 2025

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, diatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Adapun jenis pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 470/221/DISDUKCAPIL/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Februari 2025, meliputi:

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    1. Pencatatan Biodata
        a. Pencatatan Biodata WNI
        b. Pencatatan Biodata Orang Asing
    2. Penerbitan Kartu Keluarga
        a. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru
        b. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian Kepala Keluarga)

c. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah KK dalam 1 (satu) alamat
d. Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data
e. Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang/Rusak

3. Penerbitan KTP-el
   a. Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI
   b. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI
   c. Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing
   d. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk Orang Asing
4. Penerbitan KIA
   a. Penerbitan KIA Baru untuk Anak WNI
   b. Penerbitan KIA Baru untuk Anak Orang Asing
5. Perpindahan Penduduk
   a. Perpindahan Penduduk WNI
   b. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAP
   c. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS
6. Pelayanan Surat Keterangan Kedatangan
   a. Pindah Datang WNI
   b. Pindah Datang Orang Asing ITAP
   c. Pindah Datang Orang Asing ITAS
7. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Penduduk WNI (SKPLN)
8. Pelayanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri Penduduk WNI (SKDLN)
9. Pendaftaran Bagi Orang Asing/ITS Datang dari Luar Wilayah NKRI

B. Pencatatan Kelahiran dan Kematian
1. Pencatatan Kelahiran
   a. Pencatatan Kelahiran WNI
   b. Pencatatan Kelahiran Orang Asing
2. Pencatatan Lahir Mati
3. Pencatatan Kematian

C. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
    1. Pencatatan Perkawinan
        a. Pencatatan Perkawinan WNI
        b. Pencatatan Perkawinan Orang Asing
    2. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
    3. Pencatatan Perceraian
    4. Pencatatan Pembatalan Perceraian
D. Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
    1. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI/Orang Asing
    2. Pencatatan Pengakuan Anak
        a. Pencatatan Pengakuan Anak
        b. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    3. Pencatatan Pengesahan Anak
        a. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI
        b. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing
        c. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    4. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
    5. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
    6. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari subjek akta
    7. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
        a. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk (melalui Penetapan Pengadilan)
        b. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/*Contrarius Actus*
E. Kewarganegaraan
    1. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
        a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI

b. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

F. Lain-lain
   - Penduduk Non Permanen
   - Keabsahan Kutipan Akta
   - Identitas Kependudukan Digital (IKD)
   - LAMPID

Seluruh Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung secara hybrid yakni melalui Aplikasi berbasis website dan android Bandung Digital Services (BDS), pelayanan tatap muka/datang langsung ke 31 kecamatan di Kabupaten Bandung serta di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung, fasilitasi oleh Petugas Registrat Desa maupun Operator Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 140 Desa/Kelurahan untuk sarana pencetakan dokumen administrasi kependudukan secara mandiri oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Adapun seluruh layanan publik yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya alias GRATIS, sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. SATUKAN HATI (Bersama Tuntaskan Adminduk Hanya Satu Hari) yaitu penerbitan Dokumen Kependudukan yang diselesaikan hanya satu hari atau *One Day Service* dan tidak dipungut biaya atau gratis.
2. JEMPOL PELANDUK (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan)
3. SI OCES (Sistem Online Cetak Sendiri)
4. CEMARA DESA (Cetak Mandiri di Kelurahan dan Desa)
5. KUE LAPIS (Kunjungi Lansia dan Penyandang Disabilitas

6. SI CAKAR SAKTI (Sistem Cetak KK dan Akta Di Rumah Sakit)
7. SIPAPAPP (Sistem Integrasi Pelayanan Adminduk Di Pengadilan Agama Pasca Perceraian)
8. PELAMINAN CANTIK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Isbat Nikah)
9. MOBIL PELITA (Mobil Pelayanan Keliling Wisata)
10. BUAH CINTA (Buat Akta Lahir Cepat Terintegrasi Tanpa Biaya)
11. PREDATOR (Perekaman Data Kependudukan menggunakan Sepeda Motor)

Selain mengusung inovasi pelayanan, dilakukan pula kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam pemanfaatan data dan dokumen administrasi kependudukan, yakni

1. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 51 Perangkat Daerah yakni DPMPTSP, Dinsos, Disdik, Diskominfo, Disnaker, Dispora, Dinkes, Distan, Diskop UKM, DP2KBP3A, Dispakan, Disperdagin, Dispusip, Disperkimtan, Disdamkar, Dinas LH, Sekretariat DPRD, BPBD, Bapenda, BKPSDM, Kesbangpol, Satpol PP, Kec. Baleendah, Kec. Bojongsoang, Kec. Cicalengka, Kec. Dayeuhkolot, Kec. Katapang, Kec. Kutawaringin, Kec. Nagreg, Kec. Cimenyan, Kec. Cimaung, Kec. Rancaekek, Kec. Pasirjambu, Kec. Margaasih, Kec. Ciparay, Kec. Pacet, Kec. Cileunyi, Kec. Pangalengan, Kec. Rancabali, Kec. Cikancung, Kec. Pameungpeuk, Kec. Margahayu, Kec.Majalaya, Kec. Soreang, Kec. Solokan Jeruk, Kec. Ibun, Kec. Cangkuang, Kec. Ciwidey, Kec. Kertasari, Kec. Paseh, Kec. Banjaran;
2. Kerjasama Lintas Sektor dengan Lembaga terkait diantaranya DISDIK, DINSOS, DP2KBP3A, LKP NATARASA, LKP KANIRA, PT. BPR Kertaraharja) Pengadilan Agama, RSUD OTISTA, RSUD CICALENGKA, RSUD MAJALAYA, RSUD AL IHSAN dan Kementerian Agama;Pencetakan KK dan KTP/Biodata WNI di seluruh Kecamatan.

Untuk meningkatkan keterlibatan peran pengawasan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka saluran-saluran

akses informasi dan pengaduan masyarakat, baik melalui web Disdukcapil, maupun media sosial Disdukcapil, yaitu :

- Website : https://disdukcapil.bandungkab.go.id/
- Instagram : @disdukcapilbandungkab
- Talkshow : radio dan televisi
- Media lain : Billboard, leaflet, booklet, kalender, dsb.
- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan kepada aparat dan masyarakat

Selain itu, untuk penanganan Pengaduan Saran dan Masukan Masyarakat bagi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disampaikan melalui:

a. Kotak Pengaduan;
b. Website Kabupaten Bandung www.bandungkab.go.id;
c. Website Disdukcapil Kabupaten Bandung https://disdukcapil.bandungkab.go.id;
d. Media Sosial Instagram @disdukcapilbandungkab;
e. Layanan Pengaduan/Informasi melalui Meja Layanan Pengaduan;
f. Pengaduan Layanan Online melalui https://bds.bandungkab.go.id/home;
g. Layanan Pengaduan/Informasi melalui *Whatsapp* Nomor HP 085318202833.

Sesuai Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026, sampai dengan Tahun 2025, program/kegiatan/sub kegiatan disusun, diukur, direncanakan serta akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan, diukur dengan 6 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Cakupan Kepemilikan KK, Cakupan Kepemilikan KTP-el, Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Cakupan

Kepemilikan Akta Kelahiran, dan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian;

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik, diukur oleh Nilai Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil dan Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85.37	85.40	85.45	85.50	85.55	88.38	88,40	88,54	85,50	85,55	
2.	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga			96.5%	97%	97.5%	98%	98.5%	93.95%	99,68%	98,79%	98%	98.5%	
3.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)			99.5%	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%	96.36%	97,39%	99,59%	99,8%	99,9%	
4.	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			40%	50%	60%	70%	80%	30.59%	36,23%	44,14%	70%	80%	
5.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun			95%	96%	97%	98%	99%	90.53%	90,70%	91,02%	98%	99%	
6.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian			40%	60%	70%	80%	90%	53.39%	66,76%	86,05%	80%	90%	
7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja DISDUKCAPIL			74.30	74.32	74.34	74.36	74.38	75.56	80,60%	80,90%	74,36	74,38	
8.	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			91.2%	91.4%	91.6%	91.8%	92%	92.49%	97,57%	98,66%	85.5%	85,55%	

Sumber: Disdukcapil, 2025

II.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kepemilikan Akta - Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat;
4. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing;
5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui (SIAK) Terpusat;
6. Tersedianya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kematiannya;
8. Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah;
9. Peningkatan Informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat;
10. Pemanfaatan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di 140 Desa/Kelurahan;
11. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
12. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan;
13. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang mendukung pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan;

Selanjutnya disampaikan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni:

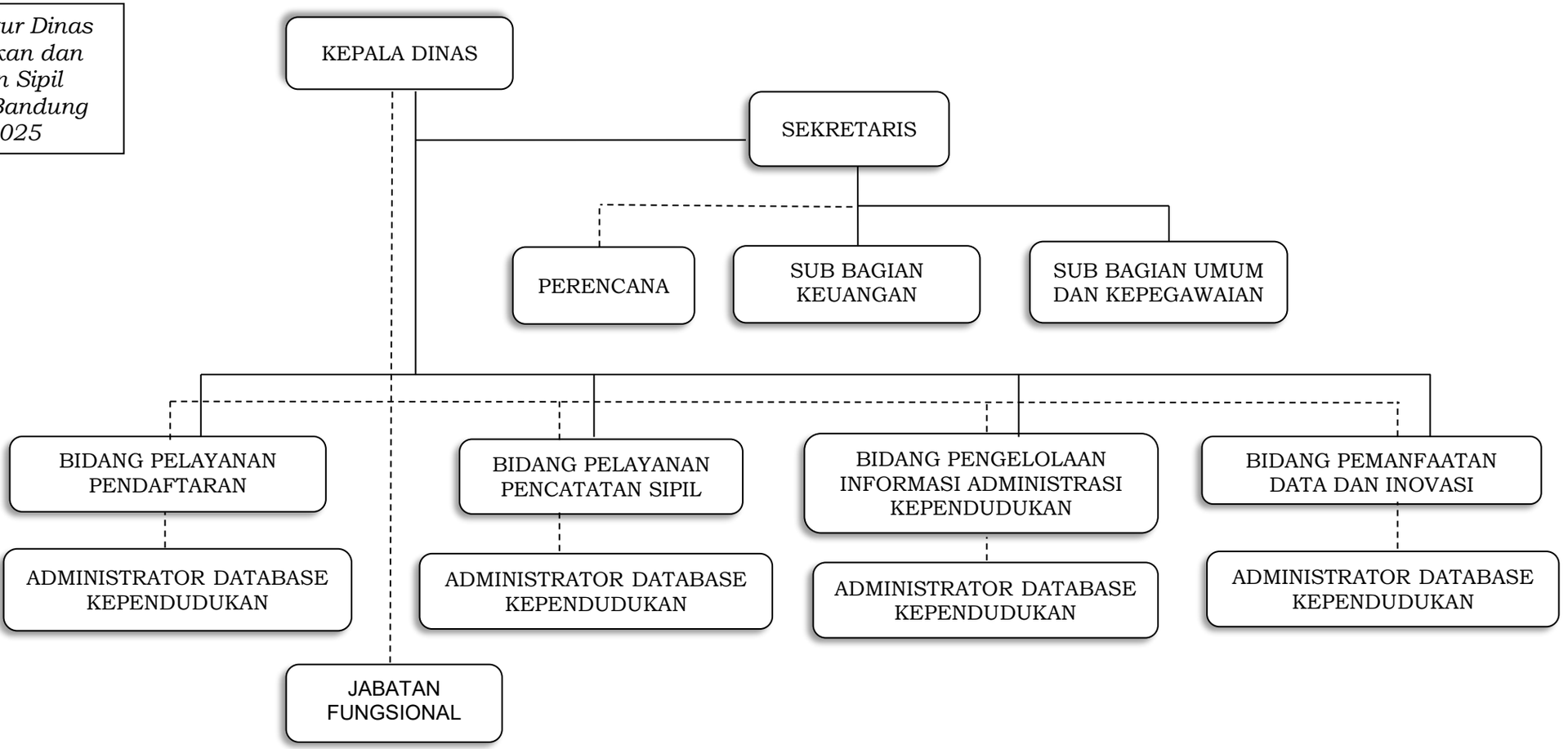
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
    a. Perencana;
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut merupakan bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2025



Selanjutnya Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas mempunyai sub tugas sebagai berikut:

   a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas;
   b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
d. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;
i. Membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
j. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
m. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan
n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas melaksanakan program :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
b. Program pendaftaran penduduk;
c. Program pencatatan sipil;
d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
e. Program pengelolaan profil kependudukan.

Selanjutnya pengelompokan tugas berdasarkan fungsi diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;

b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, dan Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan Kematian;
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan;
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Permasalahan, Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung secara umum telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun beberapa kendala masih dihadapi dan memerlukan upaya penanganan diantaranya :

1. Lingkungan Internal

a. Masih kurangnya kemampuan operator kecamatan dalam mengatasi permasalahan jaringan;
b. Sarana dan prasarana pelayanan offline dan online belum memadai
c. Masih adanya lost koneksi yang diakibatkan kapasitas *bandwidth* radar yang sudah tidak stabil;
d. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil;

e. Ketersediaan Blanko KTP-El masih tergantung alokasi dari pusat, belum bisa dilakukan pengadaan mandiri.

2. Lingkungan Eksternal

a. Kendala jaringan dan geografis wilayah Kabupaten Bandung;
b. Media komunikasi dengan warga terkait sosialisasi administrasi kependudukan maupun media pelayanan online masih terbatas.
c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   - Demografis penduduk Kabupaten Bandung yang menyebar hingga ke daerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan;
   - Masalah kelengkapan data sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat;
   - Penyempurnaan aplikasi SIAK yang berkembang sesuai dengan perubahan peraturan terkait Administrasi Kependudukan;
   - Integrasi Database Kependudukan dengan OPD terkait;
   - Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak sampai kepada masyarakat (hanya sampai ke Kecamatan dan Desa);
   - Kurangnya ketepatan waktu mendaftarkan dan register dokumen-dokumen kependudukan mulai dari tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal
   a. Melaksanakan Bimtek bagi pegawai dan operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Melaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana layanan offline dan online;
c. Melaksanakan pemeliharaan jaringan SIAK secara umum untuk memastikan lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan;
d. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur fisik jaringan SIAK sebagai langkah antisipasi apabila ada perangkat jaringan yang rusak;
e. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan *one day service;*
f. Sosialisasi administrasi kependudukan melalui media cetak dan media sosial;
g. Disusunnya Regulasi/Peraturan Bupati untuk terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan :
    - Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung
    - Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung.
    - Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Adminduk.
    - Peraturan Bupati Bandung Nomor 304 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung.
    - Peraturan Bupati Bandung Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kabupaten Bandung.
h. Memanfaatkan aplikasi SIAK Terpusat sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku dengan cara menginventarisasi dan melaporkan permasalahan dalam penggunaan sehari-hari;
i. Dilaksanakannya perbaikan *website* Disdukcapil;
j. Optimalisasi penggunaan mobil pelayanan keliling untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan pelayanan jemput bola ke kecamatan-kecamatan, desa-desa dan pelayanan terpadu bersama instansi pelayanan lainnya;

k. Pelaksanaan sosialisasi kepada aparat, lembaga dan masyarakat secara rutin dan berkala tentang pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sosialisasi melalui media sosial dan media cetak;
l. Pengendalian dan evaluasi mengenai pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
m. Optimalisasi pencetakan dan perekaman KTP Elektronik di beberapa kecamatan sehingga jaraknya mudah dijangkau masyarakat;
n. Diterbitkannya Biodata sebagai pengganti KTP Elektronik yang berlaku selama 2 minggu;
o. Mendorong Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk mengantisipasi keterbatasan blangko KTP Elektronik dan sosialisasi manfaatnya melalui Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

2. Lingkungan Eksternal
   a. Selain menerima pelayanan online melalui WhatsApp dan berbasis Web melalui Aplikasi BDS (Bandung Digital Service), Disdukcapil melanjutkan jemput bola pelayanan Administrasi Kependudukan ke Sekolah, Rumah Sakit, Pabrik, Kampus, Mall, Tempat Wisata untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa datang ke MPP (Mall Pelayanan Publik) dan Kantor Kecamatan;
   b. Diperlukannya petugas registrasi dan operator Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri di tingkat Desa sebagai jejaring kerja Disdukcapil dan mempermudah pencetakan dokumen kependudukan di wilayah desa;

c. Optimalisasi pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau masyarakat;
d. Melakukan akselerasi sinkronisasi data dari perangkat daerah dengan cara melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh;
e. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

II.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Bandung

Penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah menyampaikan rencana kerja untuk tahun 2026 yang selanjutnya dilakukan review agar dapat diselaraskan dalam penyusunan RKPD. Review ini memastikan bahwa rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan RKPD. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan. Jumlah pagu anggaran rancangan awal RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 37.688.933.971,00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil			37.688.933.971,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil			33.184.670.820,00
2	12	01	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdukcapil	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	n/a	34.530.186.971,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disdukcapil	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	51	28.478.126.230,00
						Disdukcapil	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a			Disdukcapil	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85.06	
2	12	01	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Nilai AKIP	n/a	50.550.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Nilai AKIP	81,5	96.800.000
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	7.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	16.450.000,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	8.550.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	8.550.000,00
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	5.000.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	12.000.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	19.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	47.000.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	500.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	3.900.000,00
2	12	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disdukcapil	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	500.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disdukcapil	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	3.900.000,00
2	12	01	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	13.685.466.971,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	12.242.826.000,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	13.675.466.971,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	12.167.826.000,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	75.000.000,00
2	12	01	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	98,72	10.000.000,00
2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	7.500.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	10.000.000,00
2	12	01	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	92	231.000.000,00
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	10.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	21.000.000,00
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48	10.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63	210.000.000,00
2	12	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	15.425.350.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	7.845.411.551,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25.000.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	15.190.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6.949.051.151,00
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	500.000.000,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000,00
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Disdukcapil	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	5.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Disdukcapil	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20.000.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	10.000.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126	93.350.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200.000.000,00
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	75.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	116.360.400,00
2	12	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.671.320.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	6.844.910.455,00
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	225.000.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4.366.320.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6.614.910.455,00
2	12	01	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100	670.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	98,72	1.207.178.224,00
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	250.000.000,00
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Disdukcapil	Jumlah Mebel yang Dipelihara	44	10.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Disdukcapil	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	10.000.000,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109	240.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109	847.178.224,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	100.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapil	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	100.000.000,00
					Jumlah 1				34.530.186.971,00	Jumlah 1				28.478.126.230,00
2	12	02	0	0	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	n/a	1.421.500.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	58	985.307.790,00
2	12	02	2.01	0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	100	1.281.500.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	92	869.258.000,00
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2	286.500.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2	200.356.000,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	750.000	755.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	720.000	357.870.000,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	280	70.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31	191.022.000,00
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	60.000	170.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	63.000	120.010.000,00
2	12	02	2.03	0	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	100	140.000.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	100	116.049.790,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	40.000.000,00	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0	0	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	3	23.210.000,00
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	10.000.000,00	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	7.579.790,00
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	200	90.000.000,00	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	50	85.260.000,00
2	12	03	0	0	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	n/a	458.000.000,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	86	670.174.800,00
2	12	03	2.01	0	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100	290.000.000,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100	320.174.800,00
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	75.425	200.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	81710	131.574.800,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	90.000.000,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	188.600.000,00
2	12	03	2.02	0	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	100	168.000.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	100	350.000.000,00
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	31	68.000.000,00	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	31	0

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	0	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	31	300.000.000,00
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2	100.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2	50.000.000,00
2	12	04	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	100	2.901.943.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	87,1	2.301.062.000,00
2	12	04	2.01	0	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	78.46	216.291.000,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	87,1	119.335.000,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	129.000.000,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	69.000.000,00
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	87.291.000,00	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	50.335.000,00
2	12	04	2.02	0	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	100	182.000.000,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	100	66.159.000,00
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	3	182.000.000,00	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	66.159.000,00
2	12	04	2.03	0	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	100	583.652.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	100	454.658.000,00
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	300.000.000,00	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	277.980.000,00

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	157.360.000,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	73.356.000,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	86.292.000,00	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	63.322.000,00
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2	40.000.000,00	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2	40.000.000,00
2	12	04	2.04	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	100	241.304.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	100	1.660.910.000,00
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	200.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	1.517.170.000,00
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	41.304.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	143.740.000,00
2	12	05	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	56.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	750.000.000,00
2	12	05	2.01	0	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan	62	56.000.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan	62	750.000.000,00
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	0	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	464.182.500,00
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	56.000.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	285.817.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Jumlah 2				3.158.747.000,00	Jumlah 2				4.706.544.590,00
	Jumlah Total				37.688.933.971,00	Jumlah Total				33.184.670.820,00

Sumber: Disdukcapil, 2025

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Renja Disdukcapil Tahun 2026 dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, selain itu dalam Renja Disdukcapil tidak ada program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, RENSTRA, dan RKPD yang diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dalam proses penyusunan Renja harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, maupun provinsi.

III.1.1. Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya anak berusia kurang dari 5 tahun mulai diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung pada tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terbitnya Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital memberikan solusi berupa Identitas Kependudukan Digital sebagai alternatif disaat warga tidak dapat mencetak KTP fisik dikarenakan keterbatasan blangko KTP Elektronik yang masih merupakan wewenang pusat.

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres ini berisi 9 layanan prioritas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) salah satunya Digital ID berbasis data kependudukan. IKD (Identitas Kependudukan Digital) punya peran penting sebagai kunci masuk *Single Sign On* (SSO) Nasional untuk seluruh pelayanan publik pemerintah maupun swasta. Disamping itu, masih perlunya diterbitkan payung hukum yang lebih kuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk eksistensi IKD yang lebih masif.

Disamping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berperan dalam mensukseskan capaian Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni berupa terlaksananya indikator Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.

III.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada *re-definisi* organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Disdukcapil akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalisme yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan kinerja Pemerintah melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik.

III.1.3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari bagan berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

<table>
<tr><td colspan="2">Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”</td></tr>
<tr><td>Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak dengan didukung penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
5. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum.</td><td>Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung:
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung:
1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

<u>TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</u>
A. TUJUAN
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B. SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan</td></tr>
</table>

Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah mengatur Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Sedangkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, mengatur bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Isu-isu Strategis Disdukcapil Kabupaten Bandung :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kepemilikan Akta - Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat;
4. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing;
5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui (SIAK) Terpusat;
6. Tersedianya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kematiannya;
8. Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah;
9. Peningkatan Informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat;
10. Pemanfaatan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di 140 Desa/Kelurahan;
11. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
12. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan;
13. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang mendukung pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan;

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas".

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta penguatan Kesetaraan gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5) Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 tersebut, perangkat daerah menetapkan Tujuan dan Sasaran sesuai bidang Urusan masing-masing dengan berpedoman pada sasaran yang ingin dicapai di dalam RPJMD Kabupaten Bandung sebagai pedoman pula dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

III.2.1. Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mempunyai tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

III.2.2. Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mempunyai sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan dengan Indikator berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran untuk Target Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	88,58
	Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	88,58

Sumber: Disdukcapil, 2025

III.2.3. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada indikator dari Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	88,58	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi e-SKM Diskominfo Kabupaten Bandung

Sumber: Disdukcapil, 2025

Selanjutnya diuraikan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan		
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk		
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran			
			Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil		
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag		
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	
			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan			
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan		
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	
			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu		
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk		
			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan			
			Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan		
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah			
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Aset dalam Kondisi Baik		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
			Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
			Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Sumber: Disdukcapil, 2025

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung telah menyusun Program dan Kegiatan yang terdiri dari 5 Program, 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif dalam Renja Tahun 2026 sebesar Rp 33.184.670.820,00 (Tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Disdukcapil		33.184.670.820,00				37.641.293.000,00
2	12	01	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Disdukcapil	51	28.478.126.230,00	APBD		52	30.013.972.000,00
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Disdukcapil	85.06		APBD		85.08	
2	12	01	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Disdukcapil	81,5	96.800.000	APBD		81,8	96.800.000,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	4	16.450.000,00	APBD		4	16.450.000,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdukcapil	4	8.550.000,00	APBD		4	8.550.000,00
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdukcapil	4	5.000.000,00	APBD		4	5.000.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	9	12.000.000,00	APBD		9	12.000.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	1	47.000.000,00	APBD		1	47.000.000,00
2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disdukcapil	1	3.900.000,00	APBD		1	3.900.000,00

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Disdukcapil	1	3.900.000,00	APBD		1	3.900.000,00
2	12	01	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Disdukcapil	100	12.242.826.000,00	APBD		100	12.242.826.000,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	63	12.167.826.000,00	APBD		63	12.167.826.000,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdukcapil	5	75.000.000,00	APBD		5	75.000.000,00
2	12	01	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Disdukcapil	98,72	10.000.000,00	APBD		98,75	10.000.000,00
2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disdukcapil	2	10.000.000,00	APBD		2	10.000.000,00
2	12	01	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Disdukcapil	92	231.000.000,00	APBD		94	231.000.000,00
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disdukcapil	1	21.000.000,00	APBD		1	21.000.000,00
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	63	210.000.000,00	APBD		63	210.000.000,00
2	12	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Disdukcapil	100	7.845.411.551,00	APBD		100	8.946.360.400,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1	25.000.000,00	APBD		1	25.000.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	6	6.949.051.151,00	APBD		6	8.300.000.000,00

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Disdukcapil	1	5.000.000,00	APBD		1	5.000.000,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1	15.000.000,00	APBD		1	15.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdukcapil	2	500.000.000,00	APBD		2	250.000.000,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disdukcapil	1	5.000.000,00	APBD		1	5.000.000,00
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Disdukcapil	1	20.000.000,00	APBD		1	20.000.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil	2	10.000.000,00	APBD		2	10.000.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	12	200.000.000,00	APBD		12	200.000.000,00
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil	1	116.360.400,00	APBD		1	116.360.400,00
2	12	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	100	6.844.910.455,00	APBD		100	7.126.985.600,00
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	1	5.000.000,00	APBD		1	5.000.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdukcapil	3	225.000.000,00	APBD		3	225.000.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	12	6.614.910.455,00	APBD		12	6.896.985.600,00
2	12	01	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Disdukcapil	98,72	1.207.178.224,00	APBD		98,75	1.360.000.000,00
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disdukcapil	30	250.000.000,00	APBD		30	250.000.000,00

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Disdukcapil	50	10.000.000,00	APBD		50	10.000.000,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disdukcapil	109	847.178.224,00	APBD		109	1.000.000.000,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disdukcapil	1	100.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00
					Jumlah 1				28.478.126.230,00				30.013.972.000,00
2	12	02	0	0	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Disdukcapil	58	985.307.790,00	APBD		61	1.315.378.000,00
2	12	02	2.01	0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil	92	869.258.000,00	APBD		92	1.175.378.000,00
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2	200.356.000,00	APBD		2	286.500.000,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	720000	357.870.000,00	APBD		720000	448.878.000,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	31	191.022.000,00	APBD		31	270.000.000,00
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	63000	120.010.000,00	APBD		63000	170.000.000,00
2	12	02	2.03	0	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	Disdukcapil	100	116.049.790,00	APBD		100	140.000.000,00
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Disdukcapil	3	23.210.000,00	APBD		3	40.000.000,00
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1	7.579.790,00	APBD		1	10.000.000,00
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	50	85.260.000,00	APBD		50	90.000.000,00

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	03	0	0	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Disdukcapil	86	670.174.800,00	APBD		87	950.000.000,00
2	12	03	2.01	0	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Disdukcapil	100	320.174.800,00	APBD		100	550.000.000,00
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	81710	131.574.800,00	APBD		81710	200.000.000,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Disdukcapil	4	188.600.000,00	APBD		4	350.000.000,00
2	12	03	2.02	0	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	Disdukcapil	100	350.000.000,00	APBD		100	400.000.000,00
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Disdukcapil	31	300.000.000,00	APBD		31	300.000.000,00
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Disdukcapil	2	50.000.000,00	APBD		2	100.000.000,00
2	12	04	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Disdukcapil	87,1	2.301.062.000,00	APBD		90,32	4.361.943.000,00
2	12	04	2.01	0	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	87,1	119.335.000,00	APBD		90,32	216.291.000,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Disdukcapil	1	69.000.000,00	APBD		1	129.000.000,00
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	2	50.335.000,00	APBD		2	87.291.000,00
2	12	04	2.02	0	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	Disdukcapil	100	66.159.000,00	APBD		100	182.000.000,00

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Disdukcapil	1	66.159.000,00	APBD		1	182.000.000,00
2	12	04	2.03	0	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	Disdukcapil	100	454.658.000,00	APBD		100	583.652.000,00
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	3	277.980.000,00	APBD		3	300.000.000,00
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	5	73.356.000,00	APBD		5	157.360.000,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2	63.322.000,00	APBD		2	86.292.000,00
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Disdukcapil	2	40.000.000,00	APBD		2	40.000.000,00
2	12	04	2.04	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	Disdukcapil	100	1.660.910.000,00	APBD		100	3.380.000.000,00
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2	1.517.170.000,00	APBD		2	3.080.000.000,00
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Disdukcapil	2	143.740.000,00	APBD		2	300.000.000,00

Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2027	
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	05	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil	1	750.000.000,00	APBD		1	1.000.000.000,00
2	12	05	2.01	0	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan	Disdukcapil	62	750.000.000,00	APBD		62	1.000.000.000,00
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil	1	464.182.500,00	APBD		1	618.910.000,00
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Disdukcapil	1	285.817.500,00	APBD		1	381.090.000,00
					Jumlah 2				4.706.544.590,00				7.627.321.000,00
					Jumlah Total				33.184.670.820,00				37.641.293.000,00

Sumber: Disdukcapil, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

IV.1. Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun untuk melaksanakan 5 Program dan 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dalam mendukung Sasaran Dinas yakni Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan dengan Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran tersebut yakni sebesar Rp 33.184.670.820,00 (Tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp 28,478,126,230;
2. Program Pendaftaran Penduduk Rp 985,307,790;
3. Program Pencatatan Sipil Rp 670,174,800;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 2,301,062,000;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan Rp 750,000,000.

Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T-C.41)
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran	Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penertiban Dokumen dan Data Kependudukan	2	12	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Disdukcapil		33.184.670.820,00		
	2	12	01	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Disdukcapil	51	28.478.126.230,00	APBD	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Disdukcapil	85.06		APBD	
	2	12	01	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Disdukcapil	81,5	96.800.000	APBD	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	4	16.450.000,00	APBD	
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdukcapil	4	8.550.000,00	APBD	
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdukcapil	4	5.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	9	12.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	1	47.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disdukcapil	1	3.900.000,00	APBD	

Sasaran	Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2	12	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Disdukcapil	1	3.900.000,00	APBD	
	2	12	01	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Disdukcapil	100	12.242.826.000,00	APBD	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	63	12.167.826.000,00	APBD	
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdukcapil	5	75.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Disdukcapil	98,72	10.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disdukcapil	2	10.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Disdukcapil	92	231.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disdukcapil	1	21.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	63	210.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Disdukcapil	100	7.845.411.551,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1	25.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	6	6.949.051.151,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Disdukcapil	1	5.000.000,00	APBD	

Sasaran	Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1	15.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdukcapil	2	500.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disdukcapil	1	5.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Disdukcapil	1	20.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil	2	10.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	12	200.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil	1	116.360.400,00	APBD	
	2	12	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	100	6.844.910.455,00	APBD	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	1	5.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdukcapil	3	225.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	12	6.614.910.455,00	APBD	
	2	12	01	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Disdukcapil	98,72	1.207.178.224,00	APBD	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disdukcapil	30	250.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Disdukcapil	50	10.000.000,00	APBD	
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disdukcapil	109	847.178.224,00	APBD	

Sasaran	Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disdukcapil	1	100.000.000,00	APBD	
						Jumlah 1				28.478.126.230,00		
	2	12	02	0	0	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Disdukcapil	58	985.307.790,00	APBD	
	2	12	02	2.01	0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil	92	869.258.000,00	APBD	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2	200.356.000,00	APBD	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	720000	357.870.000,00	APBD	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	31	191.022.000,00	APBD	
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	63000	120.010.000,00	APBD	
	2	12	02	2.03	0	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	Disdukcapil	100	116.049.790,00	APBD	
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Disdukcapil	3	23.210.000,00	APBD	
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1	7.579.790,00	APBD	
	2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	50	85.260.000,00	APBD	
	2	12	03	0	0	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Disdukcapil	86	670.174.800,00	APBD	
	2	12	03	2.01	0	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Disdukcapil	100	320.174.800,00	APBD	

Sasaran	Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	81710	131.574.800,00	APBD	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Disdukcapil	4	188.600.000,00	APBD	
	2	12	03	2.02	0	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	Disdukcapil	100	350.000.000,00	APBD	
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Disdukcapil	31	300.000.000,00	APBD	
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Disdukcapil	2	50.000.000,00	APBD	
	2	12	04	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Disdukcapil	87,1	2.301.062.000,00	APBD	
	2	12	04	2.01	0	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	87,1	119.335.000,00	APBD	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Disdukcapil	1	69.000.000,00	APBD	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	2	50.335.000,00	APBD	
	2	12	04	2.02	0	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	Disdukcapil	100	66.159.000,00	APBD	
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Disdukcapil	1	66.159.000,00	APBD	
	2	12	04	2.03	0	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	Disdukcapil	100	454.658.000,00	APBD	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	3	277.980.000,00	APBD	

Sasaran	Kode					Analisis Kebutuhan Anggaran 2026						Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	5	73.356.000,00	APBD	
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2	63.322.000,00	APBD	
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Disdukcapil	2	40.000.000,00	APBD	
	2	12	04	2.04	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	Disdukcapil	100	1.660.910.000,00	APBD	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2	1.517.170.000,00	APBD	
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Disdukcapil	2	143.740.000,00	APBD	
	2	12	05	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil	1	750.000.000,00	APBD	
	2	12	05	2.01	0	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan	Disdukcapil	62	750.000.000,00	APBD	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapil	1	464.182.500,00	APBD	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Disdukcapil	1	285.817.500,00	APBD	
						Jumlah 2				4.706.544.590,00		
						Jumlah Total				33.184.670.820,00		

Sumber: Disdukcapil, 2025

BAB V
PENUTUP

V.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

V.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Kelembagaan dalam Pelayanan Publik yang Baik. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;

2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham;

3. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan PD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN;

4. Renja PD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas);

5. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak

awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;

3. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Perlu peningkatan koordinasi dengan PD terkait penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Soreang, Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

YUDI ABDURAHMAN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 21
Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung 37
Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bandung 50
Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bandung..... 58
Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029..... 62
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran 65
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama..... 66
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 67
Tabel 3.5 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bandung..... 76
Tabel 4.1 (T-C.41) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 84